

RANCANGAN

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI III DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014 – 2015**

I. Pendahuluan

Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan.

Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan oleh sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Disamping itu secara historis, hubungan Indonesia dengan beberapa negara tetangga pernah dilanda konflik, serta seringkali terjadinya pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri.

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau

transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim. Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di kawasan perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya mutu sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan perbatasan. Implikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum dan potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban juga sangat merugikan negara. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan laut seperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak. Kegiatan ilegal ini terorganisir dengan baik sehingga perlu koordinasi dan kerjasama bilateral yang baik untuk menuntaskannya.

Kawasan perbatasan masih mengalami kesulitan aksesibilitas baik darat, laut, maupun udara menuju pusat-pusat pertumbuhan. Di wilayah Kalimantan dan Papua, sulitnya aksesibilitas memunculkan kecenderungan masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat di wilayah Serawak dan PNG. Minimnya aksesibilitas dari dan keluar kawasan perbatasan wilayah merupakan salah satu faktor yang turut mendorong orientasi masyarakat yang cenderung berkiblat aktivitas sosial ekonominya ke negara tetangga yang secara jangka panjang dikhawatirkan akan memunculkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan.

Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

Adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan Kalimantan (Dayak dan Melayu) menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah. Persamaan budaya dan adat masyarakat dan kegiatan pelintas batas tradisional ini merupakan isu sekaligus masalah perbatasan antarnegara yang telah ada sejak lama dan kini muncul kembali seiring dengan penanganan kawasan perbatasan darat. Kegiatan lintas batas ini telah berlangsung lama namun sampai saat ini belum dapat diatasi oleh kedua pihak (negara).

Beberapa segmen garis batas baik di darat maupun di laut belum disepakati secara menyeluruh oleh negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI. Permasalahan yang sering muncul di perbatasan darat adalah pemindahan patok-patok batas yang implikasinya menyebabkan kerugian bagi negara secara ekonomi dan lingkungan. Namun secara umum, titik koordinat batas negara di darat pada umumnya sudah disepakati. Permasalahan batas yang perlu diprioritaskan penanganannya saat ini adalah perbatasan laut, dimana garis batas laut, terutama Batas Landas Kontinen (BLK) dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagian besar belum disepakati bersama negara-negara tetangga. Belum jelas dan tegasnya batas laut antara Indonesia dan beberapa negara tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, terhadap batas negara di laut menyebabkan terjadinya pelanggaran batas oleh para nelayan Indonesia maupun nelayan asing.

Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana

Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang memadai.

Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum

Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, misalnya aparat kepolisian dan TNI-AL beserta kapal patrolinya, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar. Disamping itu, lemahnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (*illegal logging*), penyelundupan barang, dan 'penjualan manusia' (*trafficking person*), serta permasalahan identitas kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan laut, sering terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam kunjungan spesifik ke provinsi Kalimantan Utara ini, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan terkait permasalahan-permasalahan terjadi di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara yang telah dan sedang ditangani oleh Polda.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Spesifik meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	H.Desmon J.Mahesa, S.H., M.H.	Ketua Tim / Pim. Komisi III / F-P.Gerindra
2.	Risa Mariska, S.H.	Anggota Komisi III / F-PDI Perjuangan
3.	Saiful Bahri Ruray	Anggota TIM / F-P.Golkar
4.	H.Iwan Kurniawan	Anggota TIM / F-P.Gerindra
5.	Erma Suryani Ranik	Anggota Tim / F-P.Demokrat
6.	Drs.Taufiqulhadi, M.Si	Anggota Tim / F-P.Nasdem

IV. Pelaksanaan Kunjungan Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 14 sampai dengan 16 Juni 2015.

V. Objek Kunjungan Spesifik

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Tim Komisi III DPR RI melakukan berbagai kegiatan, yaitu: melakukan pertemuan dengan Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kapolda Kalimantan Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Tokoh Masyarakat.

VI. Tujuan Kunjungan Spesifik

1. Peranan Kepolisian Daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Daerah Kalimantan Utara.

2. Tantangan dan hambatan Kepolisian Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.
3. Sejauh mana pengaruhnya terhadap kondisi keamanan dan proses penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Faktor-faktor atau kendala apa saja yang menyebabkan sehingga sampai saat ini belum dibentuk Polda.
5. Bagaimana target dan rencana strategi ke depan untuk pembentukan Polda sehingga proses penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

VII. Hasil Kunjungan Spesifik

Pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, Tim Komisi III dalam kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Utara melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Sebatik perbatasan RI – Malaysia untuk memantau langsung kondisi keamanan dan patok batas perbatasan serta melakukan diskusi dan tanya jawab dengan warga yang berada di wilayah perbatasan kepulauan Sebatik. Dalam kunjungan ke wilayah perbatasan, Tim Komisi III melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan, Kapolda Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kapolres Nunukan, Kapolsek Sungai Nyamuk Sebatik, Tokoh Masyarakat serta warga pulau Sebatik yang bertempat di Markas Polsek Kecamatan Sungai Nyamuk Kepulauan Sebatik.

Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, Tim Komisi III melakukan kunjungan lapangan ke Pol Air untuk memantau dan memastikan kondisi bangunan Markas Pol Air serta sarana dan prasarana Pol Air seperti Kapal dan persenjataan serta alat pendukung lainnya.

Setelah melakukan tinjauan ke Pol Air, Tim melanjutkan perjalanan menuju lokasi/lahan yang dipersiapkan untuk dilakukan pembangunan Markas Kapolisian Daerah Kalimantan Utara.

Lahan atau Tanah tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan Gedung Markas Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

PAPARAN KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di wilayah perbatasan RI – Malaysia dan penanganannya :

Di perbatasan Indonesia dengan Malaysia (bagian Sabah dan Serawak), potensi keamanan sangat rawan karena terhambat dengan terisolasinya penduduk di wilayah perbatasan (seperti di Long Apari Kabupaten M.Hulu), terdapat kendaraan luar Indonesia yang beroperasi di Krayan dikarenakan belum ada infrastruktur jalan dari dan ke Indonesia.

Masuknya narkoba, senjata api illegal, manusia perahu, pencurian ikan, imigran gelap, dan terdapatnya pasokan pangan yang masih tergantung dengan Malaysia.

Kasus-kasus yang terjadi di daerah perbatasan :

- Narkoba 37 kasus, yang berasal dari Malaysia sebanyak 12 kasus, tersangka 29 orang, barang bukti 968,28 gr Sabu.
- Illegal Logging sebanyak 5 kasus, tersangka 7 orang, barang bukti 5 kapal, kayu ulin 25 m³, kayu sonokeling 365 m³, kayu amara 8 m³, kayu meranti 12.9060 m³.
- Illegal Fishing sebanyak 13 kasus, tersangka 15 orang, barang bukti kapal 13 unit, trawl 13 set, ikan 480 kg, dan udang 1.792 kg.

Tantangan yang dihadapi :

- Untuk menghadapi stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur khususnya Kalimantan Utara, Polda telah dan akan melakukan operasi kepolisian

baik yang bersifat operasi terpusat maupun operasi kewilayahan, Polda Kalimantan Timur juga telah melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum (criminal justice sistem) mou dengan negara tetangga pada tanggal 19 Maret 2015 yang membahas tentang tapal batas darat/laut, narkoba, pencurian ikan, imigran gelap dan ekstradisi.

- Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan Polda Kalimantan Timur guna menciptakan stabilitas Kamtibmas di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara khususnya wilayah perbatasan, adalah sebagai berikut :

1) Pesawat M28 Skytruck Registrasi P-4201	sebanyak	1 unit
2) Helicopter Bell 412 Ep Registrasi P-3002	sebanyak	1 unit
3) Kapal Type B	sebanyak	2 unit
4) Kapal Motor Cepat	sebanyak	4 unit
5) Kapal Type C1	sebanyak	2 unit
6) Kapal Type C2	sebanyak	19 unit
7) Sea Rider	sebanyak	8 unit
8) Senjata Api Laras Panjang Ss 1-V1	sebanyak	2.000 unit
9) Senjata Api Laras Panjang Ss 1-V2	sebanyak	500 unit

Rencana pembentukan Polda Kalimantan Utara

Terkait dengan rencana pembentukan Polda Kalimantan Utara adalah Type B dimana dalam penyusunan struktur organisasinya mengacu pada Peraturan Kapolri No.22 Tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polda, Kapolda dan Wakapolda beserta pejabat utama ditunjuk langsung oleh Mabes Polri, kemudian untuk mengisi personilnya di masing-masing satuan kerja diambil dari satuan kerja Polda Kalimantan Timur.

PAPARAN Pj.GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Gambaran Keadaan Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

1. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah 75.467,70 km².

Dengan rincian luas masing-masing Kab/Kota sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bulungan dengan luas 13.925,72 km²
 - b. Kabupaten Nunukan dengan luas 13.841,90 km²
 - c. Kabupaten Malinau dengan luas 42.620,70²
 - d. Kabupaten Tana Tidung dengan luas 4.828,58 km²
 - e. Kota Tarakan dengan luas 250,80 km²
2. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara di Tahun 2014 mencapai 727.035 jiwa (berdasarkan data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014).

Dengan rincian jumlah penduduk masing-masing Kab/Kota sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bulungan dengan jumlah penduduk 152.997 jiwa
 - b. Kabupaten Nunukan dengan jumlah penduduk 222.257 jiwa
 - c. Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk 83.338 jiwa
 - d. Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduk 28.439 jiwa
 - e. Kota Tarakan dengan jumlah penduduk 240.003 jiwa
3. Kondisi Wilayah

Aspek Morfologi wilayah di Provinsi Kalimantan Utara terbagi atas 3 satuan morfologi, yaitu perdataran, perbukitan rendah, dan perbukitan bergelombang. Berdasarkan fisiografis dan pembagian cekungan atau ketinggian, secara umum daerah Kalimantan Utara terdiri dari cekungan Kutai, Cekungan Tarakan, dan Tinggian Mangkaliat.

Kondisi fisik geografis wilayah yang dipengaruhi aspek morfologi dan fisiologi, maka wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 51 aliran sungai yang berada di 3 (tiga) Kabupaten antara lain : Kabupaten Bulungan sebanyak 7 Sungai (terpanjang yaitu Sei Kayan : 576 km), Kabupaten Nunukan sebanyak 10 Sungai (terpanjang yaitu Sei Sembakung : 278 km), dan di Kabupaten Malinau sebanyak 36 Sungai.

Dari ketiga daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang banyak memiliki gunung/bukit yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, setidaknya terdapat 44 buah gunung/bukit.

Di Kabupaten Nunukan terdapat 18 gunung/bukit (tertinggi yaitu Gunung Tuda Daun 1.753 meter), di Kabupaten Bulungan terdapat 16 gunung/bukit (tertinggi Gunung Kundas 1.670 meter), dan Kabupaten Malinau terdapat 10 gunung/bukit (tertinggi Gunung Kelembit 1.775 meter).

Kondisi keamanan dan proses penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.

Kondisi keamanan masyarakat pada masing-masing Kab/Kota di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya relatif aman dan terkendali. Karena pada setiap Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara sudah terbentuk pemerintahan daerah yang lengkap dengan unsur-unsur forum pimpinan daerahnya, kecuali Kabupaten Tana Tidung yang hanya memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rata-rata para penduduk di Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara berprofesi sebagai petani rumput laut, nelayan, buruh perusahaan, berkebun, pedagang, petambak ikan, kepiting, dan udang, peternak dan sebagai PNS maupun swasta.

Adapun kegiatan masyarakat di Kab/Kota telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan dari masing-masing Kepala Daerahnya. Untuk di tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dalam Pasal 21 menyebutkan :“Sebelum Gubernur Kaltara bersama DPRD Kaltara menetapkan Perda, Pergub dijadikan dasar hukum sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, dan juga semua Perda dan Pergub Kaltim sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Provinsi Kalimantan Utara”.

Tentang proses penegakan hukum di Kab/Kota telah ditangani oleh masing-masing instansi vertikal seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan keberadaannya masih mengikuti pada instansi vertikal di Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dan tentu kami sebagai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu menggandeng keberadaan dari para penegak hukum tersebut dalam usaha untuk menciptakan suasana aman, damai dan kondusif di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang rawan dengan berbagai persoalan seperti peredaran narkoba yang berasal dari Malaysia, *Illegal logging*, *Illegal Fishing* dan perdagangan manusia.

Strategi yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yaitu melakukan kunjungan kerja dan monitoring hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah se Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dan turun langsung ke masyarakat dengan memberi pencerahan dan memberikan gambaran langsung terbentuknya Prov Kaltara ini agar :

- Masyarakat mengetahui arah dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten/Kota;
- Menanyakan kepada masyarakat akan kebutuhannya seperti listrik, peralatan pertanian, peralatan nelayan dan kebutuhan yang menyangkut keperluan untuk kelangsungan hidupnya;
- Dan menyampaikan berbagai rencana pembangunan untuk di Kab/Kota oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah RI seperti :
 - 1) Pembangunan PLTA di Sungai Kayan (Peso) Kabupaten Bulungan ± 6.080 Megawatt dan PLTA di Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau.
 - 2) Perpanjangan Runaway (Landasan Pacu) Bandara Tanjung Harapan di Kabupaten Bulungan, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Nunukan di Kabupaten Nunukan dan rencana pembuatan Bandara serta pelabuhan di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan.
 - 3) Peningkatan pelabuhan Malundung Tarakan menjadi Pelabuhan Ekspor, sehingga dapat mengekspor hasil kekayaan alam dan bumi serta perikanan tanpa harus melalui Surabaya atau Jakarta.

- 4) Pembangunan jalan di Kabupaten Nunukan yang menghubungkan dengan Kecamatan Krayan, sehingga arus lalu lintas barang menjadi tercukupi untuk masyarakat di Kecamatan Krayan dan sekitarnya.
- 5) Rencana pembangunan Jalan dan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan) yang menghubungkan Pulau Tarakan dengan Kabupaten Bulungan, sehingga arus barang tidak lagi bergantung pada transportasi kapal, sehingga jika melalui jembatan Bulan akan bisa menghubungkan ke berbagai daerah di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara seperti Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Sehingga dengan rencana tersebut, masyarakat akan diajak berdialog untuk melakukan segala ketertinggalannya dengan daerah lain. Sedangkan untuk menghadapi wilayah yang berhadapan langsung dengan negara tetangga yang rawan terhadap peredaran narkoba dari negara tetangga yaitu Malaysia, seperti *Illegal logging*, *Illegal Fishing* dan perdagangan manusia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berpesan dalam setiap koordinasi yang dilakukan kepada setiap Kepala Daerah di setiap Kabupaten/Kota, agar tetap waspada dan selalu melakukan kegiatan dengan menyampaikan hal-hal yang berkembang dan cara-cara penanggulangannya diacara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, apa yang harus diwaspadai sebelum ada perbuatan yang dapat merugikan masyarakat tersebut masuk kedalam Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai gambaran umum dari kasus/perkara, berikut ini kami sampaikan tentang jumlah kasus-kasus yang ada di wilayah hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014/2015, yang kami terima dari Kepolisian Resor/Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara.

No	Perkara /Kasus	Jumlah
1.	Pencurian : - Kayu - Ikan	21 Kasus 17 Kasus

2.	Penyelundupan : - Barang - Senjata	1 Kasus 3 Kasus
3.	Narkoba	385 Kasus
4.	Penjualan Manusia/Traficking	1 Kasus
5.	Permasalahan Identitas	-
6.	Kasus Sara	-
7.	Kewarganegaraan Ganda	-
8.	Pembajakan	-
9.	Perampokan	29 Kasus
Jumlah Keseluruhan		457 Kasus

Sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung untuk pembentukan Kepolisian Daerah di Kalimantan Utara.

Sarana prasarana dan infrastruktur untuk membentuk Kepolisian Daerah di Kalimantan Utara yang secepatnya akan kami mohonkan agar di Provinsi Kalimantan Utara di bentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. Karena untuk sementara ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menyiapkan lahan untuk mendirikan Kota Mandiri sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara beserta instansi vertikal lainnya, hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada saat ini akan membebaskan lahan, yang mana rencana luasnya sampai dengan 2800 ha yang terletak dikilometer 2 menuju ke Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dan saat ini sudah dibuatkan Masterplan pembangunannya dan telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Bagaimana target dan rencana strategi ke depan untuk pembentukan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sehingga proses penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Target dan rencana strategi ke depan untuk pembentukan Kepolisian Daerah, sehingga proses penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Utara bisa berjalan dengan efektif dan efisien, sangat jelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini menunjukkan keberadaan Kepala

Daerah/Gubernur yang masih berstatus Pj. Gubernur dan pada tahun 2016 Insya Allah sudah ada Gubernur Kalimantan Utara yang definitif, sehingga untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara lengkap dengan unsur pimpinan daerahnya, sebagaimana halnya keberadaan DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang juga baru terbentuk pada tanggal 30 Desember 2014, sehingga untuk kelengkapan unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) lainnya sangat dibutuhkan keberadaannya seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer dan lain-lain. Sebagaimana rencana pembangunan instansi vertikal yang mana untuk penyediaan lahannya akan disiapkan pada tahun 2015 dan 2016 dan oleh pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan rencana gambar pembangunan Kota Mandiri telah dipersiapkan, sekalian berikut untuk pembentukan instansi vertikal di Kabupaten Tana Tidung, yang saat ini juga belum terbentuk seperti Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer maupun Kejaksaan Negeri di Kabupaten Tana Tidung, sehingga dengan keberadaan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara semua urusan dapat lebih mudah seperti halnya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, serta keamanan dan ketertiban agar terjaga keamanannya.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Kalimantan Utara.

Komisi III DPR RI

